



POTRET PEREKONOMIAN

KABUPATEN BREBES TAHUN 2020



POTRET PEREKONOMIAN KABUPATEN BREBES 2020

ISBN: -

Nomor Publikasi:

Katalog:

Ukuran Buku: 21,0 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: 90 + iv halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Desain Cover Oleh:

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes

Penerbit:

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa publikasi Potret Perekonomian Kabupaten Brebes Tahun 2021 telah selesai disusun. Publikasi ini melengkapi publikasi-publikasi lain yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

Publikasi ini memberikan gambaran secara sederhana tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Brebes pada tahun 2020. Publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, disamping itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian publikasi ini.

Akhirnya kritik, saran dan partisipasinya kami harapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa mendatang dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Brebes, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM.....	3
BAB III RUANG LINGKUP.....	6
3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	6
3.2. Pertambangan dan Penggalian	133
3.3. Industri Pengolahan	15
3.4. Pengadaan Listrik dan Gas	233
3.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	255
3.6. Konstruksi	266
3.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	288
3.8. Transportasi dan Pergudangan.....	30
3.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	344
3.10. Informasi dan Komunikasi.....	366
3.11. Jasa Keuangan dan Asuransi.....	388
3.12. Real Estat	477
3.13. Jasa Perusahaan.....	477
3.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	50
3.15. Jasa Pendidikan	50
3.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	511
3.17. Jasa Lainnya	522
BAB IV POTRET PEREKONOMIAN KABUPATEN BREBES.....	566
4.1. Struktur Ekonomi	566
4.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	622
4.3. PDRB Per Kapita.....	644
4.4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes	655
BAB V PENUTUP	800
DAFTAR PUSTAKA.....	822
LAMPIRAN.....	833

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera.

Penerapan Otonomi Daerah ini membagi dan menetapkan berbagai kewenangan tertentu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan ini tentu saja memberikan warna baru dalam stabilitas perekonomian nasional dengan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Stabilitas perekonomian nasional berdampak juga pada perekonomian di daerah, termasuk di Kabupaten Brebes.

Perekonomian Kabupaten Brebes tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,59 persen jika dibandingkan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan hingga mencapai 5,72 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar -2,65 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes berada pada posisi yang lebih tinggi.

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dievaluasi hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Dengan begitu tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang ke selatan berbatasan dengan wilayah Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Terletak pada posisi $108^{\circ} 41'$ - $109^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 44'$ - $7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 1.769,62 km² yang terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 292 desa dan 5 Kelurahan, dengan angka luasan tersebut Brebes menempati urutan ke lima sebagai kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, Grobogan, Wonogiri dan Blora.

Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes hasil Sensus Penduduk 2020 adalah 1.978.759 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu masing-masing 1.003.373 jiwa dan 975.386 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,90 yang berarti bahwa di antara 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 103 orang penduduk laki-laki.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang lalu jumlah penduduk Kabupaten Brebes sebesar 1.802.829 jiwa, sehingga telah terjadi penambahan penduduk sebanyak 175.930 jiwa selama tahun 2018 sampai dengan 2020, atau dapat dikatakan pertumbuhan rata-rata 3,25 persen per tahun. Tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Brebes 182.421 jiwa (9,22 persen), Kecamatan Bulakamba 181.758 jiwa (9,19 persen), dan Kecamatan Wanasari sebanyak 161.893 jiwa (8,18 persen). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Salem sebanyak 63.462 jiwa atau (3,21 persen).

Namun jika dilihat dari tingkat kepadatannya, dimana luas daerah turut diperhitungkan, ternyata Kecamatan Kersana, Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Wanasari menempati urutan

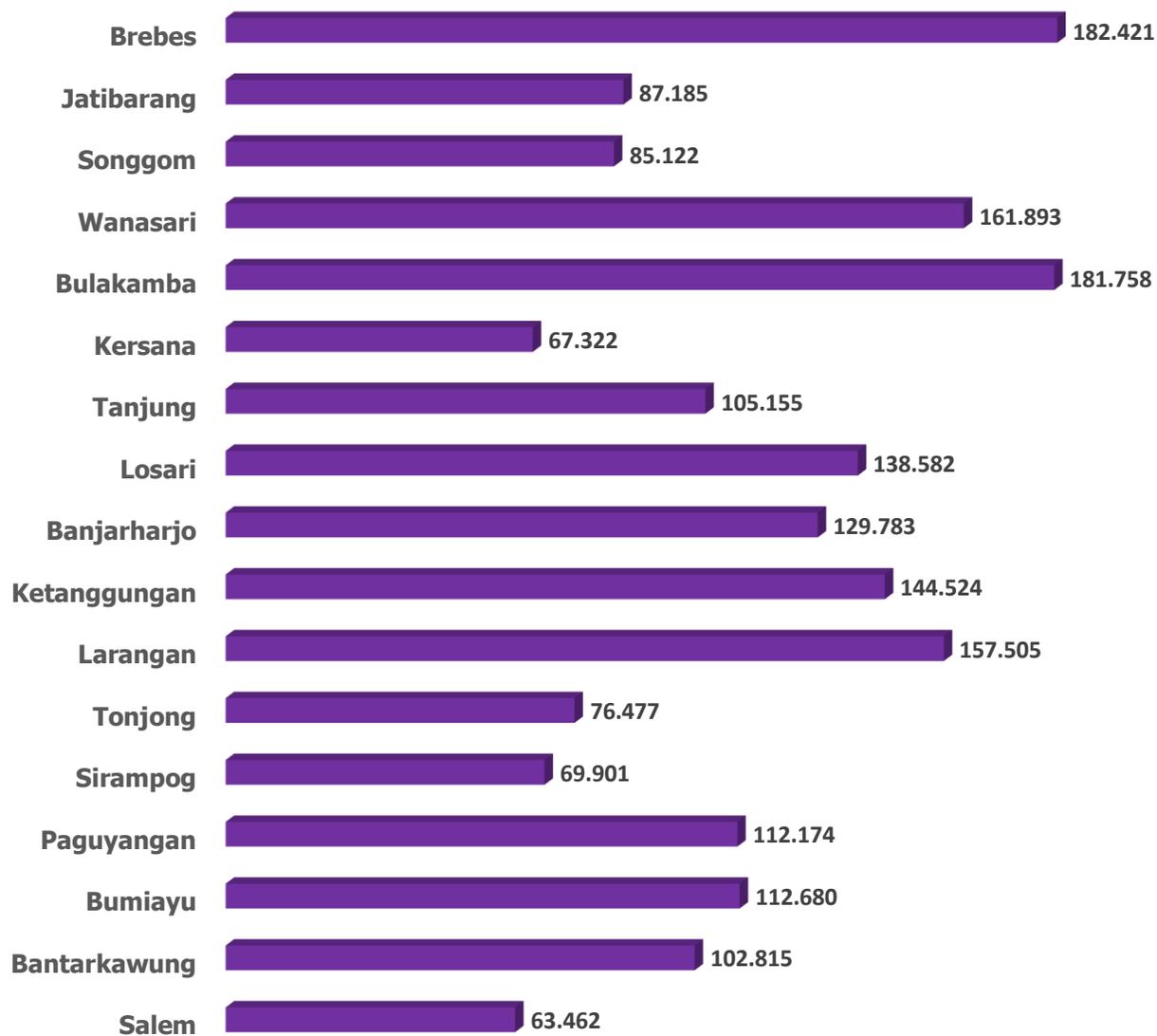
tertinggi sebagai kecamatan yang padat penduduknya dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Brebes, dimana kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 2.000 penduduk/Km2 yang berarti bahwa tiap 1 Km2 ditempati lebih dari 2.000 penduduk. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Kecamatan Salem, dimana kepadatan penduduknya hanya 380 penduduk/Km2 yang berarti bahwa tiap 1 Km2 hanya ditempati 380 penduduk.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan dan *Sex Ratio* Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes, 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	<i>Sex Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Salem	32 044	31 418	63 462	380	101,99
2 Bantarkawung	52 292	50 523	102 815	494	103,50
3 Bumiayu	57 277	55 403	112 680	1 373	103,38
4 Paguyangan	57 086	55 088	112 174	1 037	103,63
5 Sirampog	35 579	34 322	69 901	942	103,66
6 Tonjong	38 835	37 642	76 477	884	103,17
7 Larangan	79 685	77 820	157 505	983	102,40
8 Ketanggungan	72 949	71 575	144 524	942	101,92
9 Banjarharjo	65 272	64 511	129 783	802	101,18
10 Losari	70 264	68 318	138 582	1 510	102,85
11 Tanjung	53 512	51 643	105 155	1 459	103,62
12 Kersana	34 063	33 259	67 322	2 496	102,42
13 Bulakamba	92 667	89 091	181 758	1 510	104,01
14 Wanasari	82 549	79 344	161 893	2 149	104,04
15 Songgom	42 904	42 218	85 122	1 617	101,62
16 Jatibarang	44 060	43 125	87 185	2 396	102,17
17 Brebes	92 335	90 086	182 421	1 978	102,50
2020	1 003 373	975 386	1 978 759	1 118	102,90
2019	908 786	900 310	1 809 096	1 022	100,94
2018	905 683	897 146	1 802 829	1 019	100,95

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2020

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes menurut Kecamatan, 2020



BAB III

RUANG LINGKUP

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu alat ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potret Perekonomian Kabupaten Brebes ini menampilkan angka-angka PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 2010 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

3.1.1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

3.1.1.1. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi Hasil Survei Harga Perdesaan. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Statistik Produksi.

3.1.1.2. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri atas tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman

hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Pertanian Hortikultura (SPH). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Pertanian Hortikultura (SPH) dan Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan BPS Kabupaten Brebes. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

3.1.1.3. Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri atas tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan Kabupaten Brebes. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari hasil Survei Harga Perdesaan dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari hasil Survei Harga Perdesaan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

3.1.1.4. Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan Kabupaten Brebes. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari hasil Survei Harga Perdesaan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.+

3.1.1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan

penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.1.2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau

kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani Jawa Tengah, KPH Balapulang dan KPH Pekalongan Barat dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP). Data harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS melalui BPS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS lewat BPS Provisinis Jawa Tengah.

3.1.3. Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Tempat Pelelangan Ikan Triwulanan dan Dinas Perikanan (Dinkan). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Tempat Pelelangan Ikan Triwulanan, Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan dan Dinas Perikanan (Dinkan). Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS melalui BPS Provisinis Jawa Tengah. Sedangkan

data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS juga melalui BPS Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode *revaluasi*, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

3.2. Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

3.2.1. Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan, termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu *revaluasi*. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas - BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi /Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

3.2.2. Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain- lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

3.2.3. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas

dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan Indonesia Crude Price (ICP), harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

3.2.4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu PDB triwulanan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

3.3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan baku menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di

tempat yang sama. Produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

3.3.1. Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, dimana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

3.3.2. Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

3.3.3. Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, *snuff*, *chewing* dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok

dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

3.3.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

3.3.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

3.3.6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti

kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan meubeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

3.3.7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Tiga subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

3.3.8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri atas dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih

lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

3.3.9. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

3.3.10. Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

3.3.11. Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009: kode 24

3.3.12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam murni (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

3.3.13. Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

3.3.14. Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk

pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

3.3.15. Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

3.3.16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum.

Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS RI. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas,

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi BPS RI, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI, sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS RI. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas BPS RI.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri atas: produksi/indikator produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS RI. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS RI. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS RI ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan metode revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB Industri Pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

3.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

3.4.1. Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per

unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun Non PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

3.4.2. Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan NTB dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

3.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun

dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD. Sumber Data Produksi adalah Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi (BPS), APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS - BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen - BPS; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih BPS.

3.6. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan

pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya. Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku di $deflasi$ dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang BPS RI; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor BPS RI dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS RI. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS RI. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS RI.

3.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

3.7.1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk

perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesori mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

3.7.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini. Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-*deflate* menggunakan IHK umum (BPS). Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS.

3.8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

3.8.1. Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator Produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang.

Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS RI. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

3.8.2. Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkut). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

3.8.3. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas

dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.8.4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia

Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

3.8.5. Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator Produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

3.8.6. Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa

pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I- IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Rekta, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

3.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

3.9.1. Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau

dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator Produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi. Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

3.9.2. Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas

dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

3.10. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori ini terdiri atas beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain). Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf

Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

3.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

3.11.1. Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial

(termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

3.11.2. Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

3.11.2.1. Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya.

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

3.11.2.2. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

3.11.3. Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana

bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

3.11.3.1. Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.3.2. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan. Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.3.3. Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh

dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.4. Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

3.11.4.1. Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri atas pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.4.2. Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.4.3. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS

3.11.4.4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.4.5. Wali Amanat

Wali amanat (trustee) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat

Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.4.6. Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang. Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.11.4.7. Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik bertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai Penanggung Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi

diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.12. Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa/ beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

3.13. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan

kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya

3.13.1. Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

3.13.2. Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

3.13.3. Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung/drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan, serta jasa inspeksi gedung/bangunan.

3.13.4. Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

3.13.5. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruks dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

3.13.6. Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

3.13.7. Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah. Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga

Konsumen BPS.

3.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan pada kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan Pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya. Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

3.15. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori

ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan *deflasi*, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi. Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

3.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan

pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

3.17. Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan Perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

13.17.1. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima

pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan survei-survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran-BPS).

13.17.2. Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi deflatornya adalah IHK Umum. Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, dan Subdit Statistik Harga Konsumen).

13.17.3. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk

melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran-BPS.

13.17.4. Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk *Internasional Moneter Fund*, *World Bank*, *World Health Organization* (WHO), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan

keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

BAB IV

POTRET PEREKONOMIAN KABUPATEN BREBES

4.1. Struktur Ekonomi

4.1.1. Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi *agregat demand* (AD), ekspor-impor (X-M), *Agregat supply* (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut (*Tambunan, 2003 dalam perubahan struktur ekonomi indonesia*)

Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang teori migrasi dan Hoilis Chenery tentang teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Karena perekonomiannya masih bersifat tradisional dan subsistem, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja.

Struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. A.G.B. Fisher dalam Sadono Sukirno (2007) telah mengemukakan pendapat bahwa berbagai negara dapat dibedakan berdasarkan persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor primer,

sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkannya itu menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan perkapita suatu negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja, sementara sektor industri akan semakin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara antara lain pertama, disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya, yaitu apabila pendapatan naik, elastisitas permintaan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan (*income elasticity of demand*) adalah rendah untuk konsumsi bahan makanan. Sedangkan permintaan terhadap bahan-bahan pakaian, perumahan, dan barang-barang konsumsi hasil industri adalah sebaliknya.

Sifat permintaan masyarakat tersebut sesuai dengan hukum *Engels*, yang menyatakan bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli produksi barang- barang industri menjadi bertambah besar.

Faktor kedua, yaitu perubahan struktur ekonomi disebabkan pula oleh perubahan teknologi yang terus menerus berlangsung. Perubahan teknologi yang terjadi di dalam proses pembangunan akan menyebabkan perubahan pada struktur produksi yang bersifat *cumpolsory* dan *inducive*. Kemajuan teknologi akan mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi, pada akhirnya menyebabkan terjadinya perluasan pasar serta kegiatan perdagangan. Dengan demikian akan tercipta produk baru yang tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi konsumsi masyarakat desa tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat kota. Produk baru tersebut timbul karena adanya kemajuan teknologi, dengan demikian perubahan seperti itu disebut dengan perubahan struktur produksi nasional yang bersifat *cumpolsory* yaitu memproduksi produk yang belum tentu diperlukan masyarakat yang masih tradisional. Selain itu, kemajuan teknologi juga menyebabkan perubahan dalam struktur produksi nasional yang bersifat

inducive, yaitu kemajuan dalam menciptakan produk baru akan menyebabkan bertambahnya pilihan produk yang dapat dikonsumsi masyarakat, dengan demikian kemajuan teknologi menyebabkan terciptanya barang-barang yang lebih beragam dan bermutu. Perubahan-perubahan seperti ini selanjutnya menyebabkan peranan produksi barang-barang industri dalam negeri menjadi bertambah penting.

Dengan demikian, secara ringkas dapat dibuat suatu alat ukur untuk menilai apakah perekonomian suatu wilayah mengalami perubahan struktur atau tidak, yaitu dengan melihat:

1. Struktur permintaan domestik

Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, terjadi pula perubahan struktur permintaan domestik dalam bentuk menurunnya bagian pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi bahan makanan. Penurunan konsumsi bahan makanan ini dikaitkan dengan Hukum Engels yang menyatakan bahwa elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan untuk bahan makanan adalah lebih kecil dari 1 (*in elastic*), dengan demikian jika terjadi peningkatan pendapatan maka permintaan akan bahan makanan meningkat dengan persentase lebih rendah dari persentase peningkatan pendapatan perkapita.

2. Struktur produksi,

Perubahan struktur produksi yang terjadi pada saat perekonomian tumbuh biasanya ditunjukkan dengan semakin rendahnya peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, dan semakin tingginya peran sektor lain diluar sektor pertanian.

Dari sisi permintaan, pergeseran ini dijelaskan berdasarkan argumenargumen sebagai berikut. Pertama, elastisitas permintaan terhadap pendapatan dari bahan pangan bersifat *in elastic*. Kedua, perkembangan teknologi yang terjadi selain cenderung menghemat penggunaan bahan baku, juga cenderung untuk menggantikan hasil alam dengan produk-produk sintesis.

Dari sisi penawaran, terjadinya pergeseran keunggulan komparatif dari sektor pertanian ke sektor lain di luar pertanian. Pergeseran ini terjadi karena proses akumulasi

mengubah komposisi faktor-faktor produksi. Akibat terjadinya proses akumulasi ini, jumlah capital dan tenaga kerja meningkat begitu juga jumlah tenaga kerja terdidik dan tingkat teknologi yang dikuasai. Hal ini pada gilirannya mengubah keunggulan komparatif, dari sektor pertanian yang relatif pada tenaga kerja terampil ke sektor-sektor lainnya yang relatif lebih padat modal.

Teori Lewis merupakan teori pembangunan yang memusatkan perhatian pada terjadinya transformasi struktural (*structural transformation*) pada perekonomian yang pada awalnya bersifat subsisten. Teori pembangunan Lewis dikenal dengan sebutan perekonomian model dua sektor (*Lewis Two Sector Model's*). Teori Lewis ini menjelaskan bahwa proses pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama akhir dasawarsa 1960-an dan 1970-an.

Menurut Arthur Lewis, perekonomian yang terbelakang diasumsikan terdiri atas dua sektor, yaitu:

1. Sektor tradisional, adalah sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol. Lewis mengasumsikan bahwa di sektor pedesaan yang berbasis pertanian terjadi kondisi surplus tenaga kerja (*surplus labor*) sebagai suatu fakta jika sebagian tenaga kerja di sektor pertanian ditarik maka sektor tersebut tidak akan kehilangan outputnya.
2. Sektor perekonomian modern, ditandai dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang surplus di sektor pertanian dengan cara mentransfer tenaga kerja sedikit demi sedikit dari perekonomian subsisten.

4.1.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Brebes

Nilai PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 47,14 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,95 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 46,19 triliun rupiah. Walau demikian kenaikan

PDRB atas dasar harga berlaku tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 terhadap 2018. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang melanda sejak akhir tahun 2019, sehingga mengakibatkan perlambatan hampir di semua sektor perekonomian. Jika diamati kenaikan PDRB atas dasar berlaku tersebut cenderung dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara itu jika berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB juga mengalami penurunan, yaitu dari 32,84 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 32,64 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Brebes mengalami perlambatan ekonomi atau laju pertumbuhan perekonomian minus.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Brebes didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Pendidikan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Brebes.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 37,38 persen (angka ini meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya 35,65 persen). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,82 persen (naik dari 16,73 persen pada tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,04 persen (turun dari 16,67 persen pada tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,84 persen (turun dari 4,86 persen pada tahun 2019), dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum sebesar 4,28 persen (turun dari 4,53 pada tahun 2019).

Tabel 4.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,41	38,17	37,25	35,65	37,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,34	2,42	2,48	2,43	2,42
C	Industri Pengolahan	15,10	15,68	15,81	16,73	16,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
F	Konstruksi	4,05	4,18	4,30	4,34	4,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,99	16,41	16,50	16,67	16,04
H	Transportasi dan Pergudangan	2,71	2,77	2,78	2,87	1,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,32	4,40	4,53	4,28
J	Informasi dan Komunikasi	2,80	3,19	3,39	3,58	3,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,84	1,83	1,80	1,78
L	Real Estat	1,14	1,10	1,11	1,10	1,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,30	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,11	2,07	2,00	1,96
P	Jasa Pendidikan	4,36	4,56	4,71	4,86	4,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78	0,80	0,81	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	2,09	2,15	2,21	2,07
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari kelima lapangan usaha yang dominan tersebut, hanya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan yang kontribusinya terhadap PDRB meningkat selama pandemi covid-19, sedangkan peranan lapangan usaha lainnya cenderung menurun.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi pada beberapa lapangan usaha yang tentunya dalam penghitungan PDRB sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga konstan pada tahun 2020 hanya sebesar 32,64 triliun rupiah, menurun dibanding sebelumnya 32,84 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2020 terjadi penurunan jumlah produksi yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha di Kabupaten Brebes.

Pertumbuhan ekonomi secara umum terjadi karena semakin meningkatnya kegiatan pada lapangan usaha sehingga terjadi peningkatan produksi. Demikian juga sebaliknya perlambatan ekonomi terjadi karena menurunnya aktivitas atau kegiatan yang secara langsung mempengaruhi penurunan produksi. Selama tahun 2020 kondisi perekonomian di Kabupaten Brebes mengalami perlambatan sebesar 0,59 persen. Bila dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perlambatan ekonomi sebesar 2,65 persen dan angka nasional sebesar 2,07 persen, maka perlambatan ekonomi di Kabupaten Brebes masih tergolong rendah.

Dari 17 lapangan usaha, sebanyak 7 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, sedangkan 10 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi adalah yang laju pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu mencapai 11,31 persen,

namun demikian kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil, yaitu hanya 3,94 persen.

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,60	1,75	2,43	0,64	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	6,16	6,72	6,04	3,84	1,38
C	Industri Pengolahan	7,07	8,17	5,27	12,98	-0,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,61	5,30	5,34	4,51	2,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	3,19	4,97	4,32	3,43
F	Konstruksi	-0,98	5,30	6,08	5,20	-2,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27	7,06	5,75	6,35	-4,98
H	Transportasi dan Pergudangan	6,69	6,27	7,07	8,91	-30,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	12,10	8,51	8,61	-4,83
J	Informasi dan Komunikasi	8,37	16,25	14,52	12,20	11,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,36	6,15	3,69	3,73	0,96
L	Real Estate	6,85	2,38	5,74	5,81	-0,51
M,N	Jasa Perusahaan	10,62	9,44	10,05	11,07	-4,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	4,44	3,85	1,12	-0,92
P	Jasa Pendidikan	7,71	7,53	8,58	7,97	-0,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	6,68	9,35	7,06	7,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,70	8,08	10,12	9,48	-4,89
Produk Domestik Regional Bruto		5,11	5,65	5,26	5,72	-0,59

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 4.3 Nilai Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita di Kabupaten Brebes, 2016-2020

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- Atas Dasar Harga Berlaku	37 449	39 963	42 973	46 188	47 143
- Atas Dasar Harga Konstan	27 931	29 509	31 060	32 836	32 641
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku	20 934	22 251	23 837	25 531	23 825
- Atas Dasar Harga Konstan	15 614	16 430	17 229	18 150	16 496
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,67	5,23	4,86	5,35	-9,12
Jumlah Penduduk	1 788 880	1 796 004	1 802 829	1 809 096	1 978 759
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,45	0,42	0,40	0,38	9,38

Ket.:

* *Angka sementara*

** *Angka sangat sementara*

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena dalam penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku belum mempertimbangkan pengaruh angka inflasi. Pada tahun 2016 PDRB per

kapita tercatat sebesar 20,93 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 25,53 juta rupiah. Namun kondisi pandemi covid-19 menyebabkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Brebes pada tahun 2020 menurun menjadi 23,82 juta rupiah.

4.4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan setiap lapangan usaha periode 2016-2020.

4.4.1. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura Semusim, Perkebunan Semusim, Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya, Perkebunan Tahunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Brebes.

Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 17,62 triliun rupiah atau sebesar 37,38 persen. Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam menciptakan nilai tambah pada lapangan usaha ini (88,92 persen), disusul oleh Subkategori Perikanan (6,93 persen) dan Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu memberikan kontribusi yang paling kecil (4,15 persen).

Pada tahun 2020, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 dengan

0,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih tahan guncangan selama pandemi covid-19 dibandingkan lapangan usaha lainnya dikarenakan kebutuhan primer bagi seluruh penduduk, terutama pangan sangat bergantung pada output yang dihasilkan oleh lapangan usaha ini.

Tabel 4.4 Peranan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	89,70	88,94	88,75	88,63	88,92
	a. Tanaman Pangan	18,04	17,64	16,84	15,46	15,20
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	34,69	32,56	33,52	34,87	35,09
	c. Perkebunan Semusim	0,69	0,70	0,74	0,77	0,72
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	27,82	28,98	28,28	27,73	28,81
	e. Perkebunan Tahunan	0,75	0,77	0,76	0,77	0,73
	f. Peternakan	5,37	5,84	6,13	6,48	5,96
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,35	2,44	2,48	2,54	2,42
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,23	4,50	4,50	4,35	4,15
	3 Perikanan	6,07	6,56	6,75	7,02	6,93
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.2. Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: Subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; Subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit; Subkategori Pertambangan Bijih Logam; dan Subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

Di Kabupaten Brebes hanya ada Subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya, seperti: penggalian batu kali dan penggalian pasir. Secara umum, kontribusi Subkategori

Pertambangan dan Penggalian Lainnya terhadap PDRB Kabupaten Brebes cenderung stabil berkisar pada angka 2 persen lebih dalam lima (5) tahun terakhir. Pada tahun 2020 kontribusi subkategori ini mencapai 1,14 triliun rupiah (2,42 persen), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 1,12 triliun rupiah (2,43 persen).

Tabel 4.5 Peranan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
B	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertambangan dan Penggalian		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.3. Industri Pengolahan

Lapangan usaha Industri Pengolahan mencakup 16 subkategori. Pada tahun 2020 lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Brebes sebesar 7,93 triliun rupiah. Angka ini menyumbang sekitar 16,82 persen dari total PDRB kabupaten Brebes. Subkategori Industri Makanan dan Minuman merupakan penyumbang terbesar terhadap pemerolehan PDRB Kabupaten Brebes pada lapangan usaha ini (13,75 persen). Sedangkan Subkategori Industri Batu Bara dan Pengilangan Migas, Industri Logam Dasar, dan Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL tidak memberikan kontribusi terhadap pemerolehan PDRB (0 persen) dikarenakan tidak ada aktifitas subkategori tersebut di Kabupaten Brebes.

Tabel 4.6 Peranan Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Industri Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Industri Makanan dan Minuman	82,65	83,02	82,37	79,38	81,78
	3 Pengolahan Tembakau	1,07	1,07	1,06	1,00	0,97
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2,46	2,42	2,58	5,54	4,99
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,36	0,34	0,41	0,90	0,86
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6,50	6,44	7,19	6,37	4,81
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,48	0,45	0,50	0,48	0,47
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,23	1,19	1,18	2,04	2,09
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	2,43	2,38	2,20	1,99	1,90
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2,07	1,98	1,83	1,68	1,51
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Industri Alat Angkutan	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
	15 Industri Furnitur	0,29	0,27	0,28	0,26	0,25
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,32	0,31	0,29	0,26	0,25
Industri Pengolahan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama tahun 2020 lapangan usaha Industri Pengolahan melambat sebesar -0,17 persen. Hampir seluruh subkategori pada lapangan usaha ini mengalami perlambatan (laju pertumbuhan negatif), kecuali subkategori Industri Makanan dan Minuman (2,69 persen), subkategori Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional (3,34 persen), dan subkategori Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman (0,15 persen).

4.3.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberi kontribusi sebesar 0,03 triliun rupiah atau sekitar 0,06 persen terhadap perekonomian Kabupaten Brebes pada tahun 2020. Dari kontribusi tersebut, hampir seluruhnya (93,82 persen) merupakan kontribusi dari Subkategori Ketenagalistrikan dan hanya 6,18 persen dari Subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es.

Laju pertumbuhan pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas cenderung menurun dalam tiga (3) tahun terakhir. Laju pertumbuhannya pada tahun 2018 sebesar 5,34 persen menurun menjadi 4,51 pada tahun 2019, dan menjadi 2,02 persen pada tahun 2020.

Tabel 4.7 Peranan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	1 Ketenagalistrikan	93,53	93,58	93,66	93,62	93,82
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	6,47	6,42	6,34	6,38	6,18
Pengadaan Listrik dan Gas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian Kabupaten Brebes selama tahun 2020 relatif kecil sekitar 0,026 triliun rupiah atau sebesar 0,06 persen.

Tabel 4.8 Peranan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.6. Konstruksi

Pada tahun 2020, kontribusi lapangan usaha konstruksi mencapai 1,95 triliun rupiah atau sebesar 4,15 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Brebes. Angka tersebut menurun dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 2,00 triliun rupiah (4,34 persen).

Tabel 4.9 Peranan Lapangan Usaha Konstruksi terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Konstruksi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama masa pandemi covid-19 tahun 2020, berbagai proyek konstruksi seperti, perbaikan beberapa ruas jalan, pembangunan fly over, perbaikan bantaran sungai dan saluran air, maupun proyek pembuatan bangunan gedung atau rumah banyak yang berkurang. Hal ini secara signifikan menyebabkan lapangan usaha konstruksi tidak tumbuh seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kontribusi lapangan usaha konstruksi selama periode 2016-2020 relatif sama, yaitu berkisar 4 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, selama tahun 2020 lapangan usaha konstruksi di Kabupaten Brebes mengalami perlambatan, yaitu -2,83 persen.

4.4.7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 16 persen. Pada tahun 2020, lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Brebes senilai 7,56 triliun rupiah atau sekitar 16,04 persen. Sumbangan terbesar berasal dari Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 13,85 persen.

Tabel 4.10 Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	14,78	14,85	14,57	14,53	13,64
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	85,22	85,15	85,43	85,47	86,36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara umum, distribusi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurun, yaitu dari 16,67 persen pada tahun 2019 menjadi 16,04 persen pada tahun 2020. Demikian pula, terjadi laju pertumbuhan negatif, yaitu -4,98 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,35 persen.

4.4.8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 4 (empat) yang ada di Kabupaten Brebes, yaitu Angkutan Rel; Angkutan Darat; Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir.

Tabel 4.11 Peranan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	1 Angkutan Rel	2,93	3,09	3,26	3,44	2,79
	2 Angkutan Darat	94,60	94,24	93,94	93,61	94,90
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
	5 Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	2,39	2,59	2,72	2,88	2,23
Transportasi dan Pergudangan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kontribusi lapangan usaha ini mencapai 0,93 triliun rupiah atau sekitar 1,97 persen terhadap PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2020. Moda lapangan usaha Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar (1,87 persen), disusul oleh angkutan rel (0,05 persen), dan jasa pergudangan angkutan, pos dan kurir (0,04 persen). Selama tahun 2020, kategori ini mengalami pelambatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai -30,75 persen. Hal ini disebabkan akibat kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM selama pandemi covid-19 dalam rangka menekan penularan virus tersebut, sehingga diterapkan pembatasan bepergian menggunakan moda transportasi umum serta pemberlakuan persyaratan bepergian dengan menyertakan hasil Test Antigen. Kondisi menyebabkan sebagian besar masyarakat enggan untuk melakukan bepergian jauh.

4.4.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Brebes sebesar 2,02 triliun rupiah atau 4,28 persen pada tahun 2020. Sekitar 4,22 persen dari PDRB total (atau 98,66 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari Subkategori Penyediaan Makan Minum. Sedangkan selebihnya merupakan kontribusi dari Subkategori Penyediaan Akomodasi (1,34 persen).

Tabel 4.12 Peranan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	1 Penyediaan Akomodasi	2,11	2,09	2,02	1,91	1,34
	2 Penyediaan Makan Minum	97,89	97,91	97,98	98,09	98,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama lima (5) tahun terakhir, laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman, baik yang memiliki lokasi tetap maupun secara berkeliling.

4.4.10. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan penting sebagai penunjang aktivitas pada setiap kegiatan ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan informasi dan komunikasi sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan lapangan usaha ini tahun 2020 tercatat sebesar 1,86 triliun rupiah (3,94 persen). Laju pertumbuhannya cenderung berfluktuasi, dimana mencapai titik tertinggi pada tahun 2017, yaitu 16,25 persen, sedangkan pada tahun 2020 laju pertumbuhannya sebesar 11,31 persen.

Tabel 4.13 Peranan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J Informasi dan Komunikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Informasi dan Komunikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Percepatan laju pertumbuhan lapangan usaha ini cukup pesat selama kondisi pandemi covid-19. Hal ini dilakukan karena selama pandemi covid-19 hampir sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan secara online, seperti pembelajaran via online,

transaksi belanja online, dan maraknya kegiatan *zoom meeting*, baik untuk pekerjaan maupun pembelajaran. Sehingga secara langsung berimbas terhadap meningkatnya penggunaan internet selama masa pandemi covid-19.

4.4.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada Subkategori Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Selama tahun 2020, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 72,86 persen terhadap PDRB dari Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Berikutnya adalah Subkategori Jasa Keuangan Lainnya dengan sumbangan sekitar 25,69 persen. Sementara itu, kontribusi Subkategori Asuransi dan Dana Pensiun dan Jasa Penunjang Keuangan terhadap lapangan usaha ini masing-masing kurang dari 2 persen selama kurun 5 tahun terakhir.

Tabel 4.14 Peranan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	1 Jasa Perantara Keuangan	76,22	75,42	74,43	72,61	72,86
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	1,25	1,28	1,34	1,41	1,45
	3 Jasa Keuangan Lainnya	22,53	23,29	24,22	25,97	25,69
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Keuangan dan Asuransi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.12. Real Estat

Lapangan Usaha Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Brebes dengan peranan sekitar 1 (satu) persen selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, sumbangan pada lapangan usaha ini sebesar 0,51 triliun rupiah atau 1,09 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha ini fluktuatif. Pada tahun 2020, lapangan usaha ini mengalami perlambatan, yaitu -0,51 persen akibat pandemi covid-19.

Tabel 4.15 Peranan Lapangan Usaha Real Estate terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Real Estate		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.13. Jasa Perusahaan

Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu kurang dari 1 (satu) persen atau 0,14 triliun rupiah selama tahun 2016-2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan lapangan usaha terhadap pemerolehan PDRB Kabupaten Brebes relatif kecil dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya.

Laju pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan juga berfluktuasi. Tahun 2020 lapangan usaha ini mengalami perlambatan sebesar -4,43 persen, menurun tajam dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 10,07 persen.

Tabel 4.16 Peranan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M, N Jasa Perusahaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa Perusahaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang bersifat pemerintahan dan pertahanan (militer), pada umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 4.17 Peranan Lapangan Usaha Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama tahun 2016-2020 peranannya menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dari 2,00 persen pada tahun 2019 menjadi 1,96 persen pada tahun 2020. Sementara itu, laju pertumbuhannya berfluktuatif selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2,37 persen pada tahun 2016 menjadi -0,92 persen pada 2020.

4.4.15. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2020 jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,84 persen terhadap total PDRB Kabupaten Brebes. Kontribusinya terhadap PDRB meningkat dari 2,24 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 2,28 triliun rupiah pada tahun 2020. Selama tahun 2020, Jasa Pendidikan mengalami perlambatan sebesar -0,31 persen.

Tabel 4.18 Peranan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P	Jasa Pendidikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa Pendidikan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2020, kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Brebes

sebesar 0,41 triliun rupiah (0,87 persen) dengan laju pertumbuhan sebesar 7,70 persen. Selama tahun 2016-2020 peranannya menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 0,77 persen (2016), 0,78 persen (2017), 0,80 persen (2018), 0,81 persen (2019), dan 0,87 persen (2020).

Tabel 4.19 Peranan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.4.17. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Brebes tahun 2020 sebesar 0,98 triliun rupiah. Selama tahun 2016-2020 kontribusi lapangan usaha ini relatif stabil pada kisaran dua perse, tetapi mengalami perlambatan sebesar -4,89 persen.

Tabel 4.20 Peranan Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB Kabupaten Brebes (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R, S, T, U	Jasa Lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa Lainnya		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket.:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

BAB V

PENUTUP

Selama tahun 2020, pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Brebes sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19. Hampir sebagian besar lapangan usaha mengalami perlambatan yang signifikan, kecuali lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sementara lapangan usaha lainnya sebagian besar terkena imbasnya akibat pandemi covid-19 yang melanda hampir dua tahun ini.

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Brebes masih berada pada struktur perekonomian tradisional. Hal ini ditandai dengan masih berperannya sektor pertanian yang dominan (37,38 persen). Namun demikian selama lima tahun terakhir telah menunjukkan proses perubahan menuju struktur perekonomian modern, yaitu dengan adanya peningkatan peranan selain sektor pertanian, khususnya pada lapangan usaha Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pergeseran struktur perekonomian ini dimungkinkan sebagai akibat adanya pembangunan Kawasan Industri Brebes (KIB) yang secara signifikan memberi kontribusi besar dalam pemerolehan PDRB di Kabupaten Brebes. Adanya KIB juga berpengaruh dalam menghidupkan perputaran roda perekonomian di Kabupaten Brebes serta mampu menyerap tenaga kerja untuk sektor industri pengolahan.

Pergeseran struktur ini diharapkan akan menjadi indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes. Namun demikian, proses pergeseran struktur perekonomian ini diharapkan jangan sampai melalaikan peran sektor pertanian. Hal ini dikarenakan lapangan usaha pertanian di Kabupaten Brebes merupakan sektor basis yang masih dominan terutama berkaitan dengan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2008, PDRB, *Produk Domestik Regional Bruto, Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota, Pengertian Dasar, Buku 1*, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008, PDRB, *Produk Domestik Regional Bruto, Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota, Tata Cara Penghitungan Menurut Lapangan Usaha, Buku 2*, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2009, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Cetaka III, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2013, Terjemahan Sistem Neraca Nasional 2008 Dalam Bahasa Indonesia Cetaka I, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, PDRB Kabupaten Brebes Menurut Menurut Lapangan Usaha, berbagai seri, BPS, Brebes.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes Dalam Angka, berbagai seri, BPS, Brebes
- Iwan Jaya Azis, 1994, Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia, LPFE UI, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 2006, Makro *Ekonomi Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15 134,23	15 254,28	16 007,28	16 467,51	17 620,68
B	Pertambangan dan Penggalian	875,71	965,25	1 066,48	1 121,28	1 140,04
C	Industri Pengolahan	5 654,38	6 266,71	6 793,53	7 728,53	7 928,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,70	23,59	25,62	26,89	27,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,72	21,52	22,66	24,07	26,51
F	Konstruksi	1 515,61	1 669,93	1 849,76	2 004,72	1 954,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 989,88	6 558,79	7 092,76	7 699,77	7 560,50
H	Transportasi dan Pergudangan	1 016,07	1 107,77	1 194,88	1 327,64	927,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 522,69	1 726,20	1 892,78	2 091,59	2 017,87
J	Informasi dan Komunikasi	1 049,71	1 274,20	1 458,05	1 653,11	1 858,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	665,47	733,98	786,73	829,22	837,55
L	Real Estate	425,89	438,92	475,80	509,74	513,10
M,N	Jasa Perusahaan	96,34	109,46	123,23	140,85	137,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	784,00	843,94	888,96	924,80	924,20
P	Jasa Pendidikan	1 632,64	1 821,48	2 026,14	2 243,62	2 282,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	287,07	310,93	343,29	374,69	408,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	757,60	836,16	925,44	1 020,16	977,78
Produk Domestik Regional Bruto		37 448,72	39 963,11	42 973,40	46 188,18	47 143,20

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10 375,35	10 557,09	10 813,78	10 882,97	11 281,97
B	Pertambangan dan Penggalian	583,03	622,22	659,83	685,16	694,64
C	Industri Pengolahan	4 012,95	4 340,80	4 569,38	5 162,31	5 153,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,47	19,44	20,48	21,41	21,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,71	19,30	20,26	21,14	21,86
F	Konstruksi	1 167,51	1 229,35	1 304,09	1 371,90	1 333,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 085,16	5 444,35	5 757,57	6 123,18	5 818,20
H	Transportasi dan Pergudangan	893,51	949,52	1 016,64	1 107,18	766,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 212,95	1 359,70	1 475,36	1 602,33	1 524,93
J	Informasi dan Komunikasi	1 159,24	1 347,58	1 543,29	1 731,57	1 927,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	486,86	516,80	535,88	555,88	561,21
L	Real Estate	375,50	384,45	406,53	430,15	427,95
M,N	Jasa Perusahaan	74,36	81,37	89,55	99,46	95,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	566,89	592,05	614,85	621,75	616,05
P	Jasa Pendidikan	1 073,55	1 154,42	1 253,47	1 353,37	1 349,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214,63	228,97	250,37	268,05	288,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	612,33	661,80	728,79	797,88	758,83
Produk Domestik Regional Bruto		27 930,99	29 509,21	31 060,11	32 835,67	32 640,97

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,41	38,17	37,25	35,65	37,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,34	2,42	2,48	2,43	2,42
C	Industri Pengolahan	15,10	15,68	15,81	16,73	16,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
F	Konstruksi	4,05	4,18	4,30	4,34	4,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,99	16,41	16,50	16,67	16,04
H	Transportasi dan Pergudangan	2,71	2,77	2,78	2,87	1,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	4,32	4,40	4,53	4,28
J	Informasi dan Komunikasi	2,80	3,19	3,39	3,58	3,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,84	1,83	1,80	1,78
L	Real Estate	1,14	1,10	1,11	1,10	1,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,30	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,11	2,07	2,00	1,96
P	Jasa Pendidikan	4,36	4,56	4,71	4,86	4,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78	0,80	0,81	0,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	2,09	2,15	2,21	2,07
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,15	35,78	34,82	33,14	34,56
B	Pertambangan dan Penggalian	2,09	2,11	2,12	2,09	2,13
C	Industri Pengolahan	14,37	14,71	14,71	15,72	15,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07
F	Konstruksi	4,18	4,17	4,20	4,18	4,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,21	18,45	18,54	18,65	17,82
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,22	3,27	3,37	2,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,34	4,61	4,75	4,88	4,67
J	Informasi dan Komunikasi	4,15	4,57	4,97	5,27	5,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,74	1,75	1,73	1,69	1,72
L	Real Estate	1,34	1,30	1,31	1,31	1,31
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,29	0,30	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,03	2,01	1,98	1,89	1,89
P	Jasa Pendidikan	3,84	3,91	4,04	4,12	4,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78	0,81	0,82	0,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,19	2,24	2,35	2,43	2,32
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,60	1,75	2,43	0,64	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	6,16	6,72	6,04	3,84	1,38
C	Industri Pengolahan	7,07	8,17	5,27	12,98	-0,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,61	5,30	5,34	4,51	2,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	3,19	4,97	4,32	3,43
F	Konstruksi	-0,98	5,30	6,08	5,20	-2,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27	7,06	5,75	6,35	-4,98
H	Transportasi dan Pergudangan	6,69	6,27	7,07	8,91	-30,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	12,10	8,51	8,61	-4,83
J	Informasi dan Komunikasi	8,37	16,25	14,52	12,20	11,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,36	6,15	3,69	3,73	0,96
L	Real Estate	6,85	2,38	5,74	5,81	-0,51
M,N	Jasa Perusahaan	10,62	9,44	10,05	11,07	-4,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	4,44	3,85	1,12	-0,92
P	Jasa Pendidikan	7,71	7,53	8,58	7,97	-0,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	6,68	9,35	7,06	7,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,70	8,08	10,12	9,48	-4,89
Produk Domestik Regional Bruto		5,11	5,65	5,26	5,72	-0,59

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 6 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes menurut Lapangan Usaha, 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	145,87	144,49	148,03	151,31	156,18
B	Pertambangan dan Penggalian	150,20	155,13	161,63	163,65	164,12
C	Industri Pengolahan	140,90	144,37	148,68	149,71	153,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	112,09	121,33	125,07	125,63	124,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110,75	111,49	111,85	113,86	121,28
F	Konstruksi	129,82	135,84	141,84	146,13	146,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	117,79	120,47	123,19	125,75	129,95
H	Transportasi dan Pergudangan	113,72	116,67	117,53	119,91	120,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,54	126,95	128,29	130,53	132,33
J	Informasi dan Komunikasi	90,55	94,56	94,48	95,47	96,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	136,69	142,02	146,81	149,17	149,24
L	Real Estate	113,42	114,17	117,04	118,50	119,90
M,N	Jasa Perusahaan	129,57	134,52	137,62	141,61	144,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	138,30	142,55	144,58	148,74	150,02
P	Jasa Pendidikan	152,08	157,78	161,64	165,78	169,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133,75	135,79	137,11	139,79	141,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	123,72	126,35	126,98	127,86	128,85
Produk Domestik Regional Bruto		134,08	135,43	138,36	140,66	144,43

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 7 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes menurut Lapangan Usaha, 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,50	-0,94	2,45	2,22	3,22
B	Pertambangan dan Penggalian	4,08	3,28	4,19	1,25	0,29
C	Industri Pengolahan	5,16	2,46	2,98	0,70	2,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,38	8,24	3,08	0,45	-0,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	0,67	0,33	1,79	6,52
F	Konstruksi	1,57	4,64	4,42	3,02	0,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,19	2,27	2,26	2,08	3,34
H	Transportasi dan Pergudangan	0,55	2,59	0,74	2,02	0,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,30	1,13	1,05	1,75	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	0,09	4,42	-0,08	1,05	1,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	3,91	3,37	1,61	0,05
L	Real Estate	1,59	0,66	2,51	1,25	1,18
M,N	Jasa Perusahaan	3,73	3,82	2,30	2,90	2,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,48	3,07	1,43	2,88	0,86
P	Jasa Pendidikan	3,16	3,75	2,45	2,56	2,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	1,53	0,97	1,95	1,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,79	2,12	0,50	0,69	0,78
Produk Domestik Regional Bruto		3,44	1,01	2,16	1,67	2,68

* Angka sementara

** Angka sangat sementara